



**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat diselesaikan, dengan harapan semoga nilai yang diperoleh akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini telah dipayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun telah diupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan biro-biro yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semoga Laporan Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018.

Pangkalpinang,     Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Dr.YAN MEGAWANDI, S.H.,M.Si  
Pembina Utama  
NIP. 19640130 198811 1 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

##### 1.1.1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi yaitu ***"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"***.

##### 1.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
2. Misi III :Meningkatkan sumber daya Manusia yang unggul dan handal dan Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan pembangunan yang Demokrasi

3. Misi V :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
4. Misi VI :Meningkatkan Pengendalian Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

### 1.2.1. Tujuan

1. Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat
2. Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat
3. Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan
4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi
5. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
6. Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian

8. Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
9. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara
10. Birokrasi yang bersih dan akurat
11. Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda
12. Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas
13. Terwujudnya kinerja pelayanan kesekretariatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
4. Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampaikan pendapat/aspirasi

5. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan
6. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos
7. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata
8. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
9. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian
10. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya
11. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam
12. Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
13. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif
14. Meningkatnya nilai manajemen perubahan
15. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi
16. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda
17. Meningkatnya nilai akuntabilitas

18. Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik
19. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
20. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan
21. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan
22. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik
23. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan secara administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.
4. Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, secara struktural, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris Daerah, 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Kepala Biro dan 27 (duapuluhtujuhkepalabagian) serta 81 (delapanpuluhsatukepala sub bagian).

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
    - i. Bagian Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah.
      - b. Sub Bagian Tata Usaha
      - c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
    - ii. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
      - b. Sub Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif.
      - c. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.
    - iii. Bagian Kerja Sama , terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Fasilitas Instansi Vertikal.
      - b. Sub Bagian Kerja sama Swasta dan Luar Negeri.
      - c. Sub Bagian Kerja sama Antar Daerah.
  2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    - i. Bagian Fasilitas Kegamaan, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Tata Usaha.
      - b. Sub Bagian Urusan Perhajian, Wakaf dan Zakat.
      - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Bina Kerukunan Beragama.

- ii. Bagian Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Pariwisata, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
    - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
    - c. Sub Bagian Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
  - iii. Bagian Sosial, Kesehatan dan Transmigrasi, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kesehatan.
    - b. Sub Bagian Sosial
    - c. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Biro Hukum, membawahkan :
- i. Bagian Hukum Perundang-Undangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Peraturan Daerah
    - b. Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
    - c. Sub Bagian Naskah Hukum Lainnya
  - ii. Bagian Pelayanan Hukum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Sengketa Hukum
    - b. Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum
    - c. Sub Bagian Penyeluhan Hukum dan Ham
  - iii. Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan Hukum
    - b. Sub Bagian Publikasi Informasi Hukum
    - c. Sub Bagian Tata Usaha
- II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- 1. Biro Perekonomian, membawahkan :
    - i. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi Sarana dan Perekonomian
  - b. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
  - c. Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan.
    - b. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
    - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - iii. Bagian BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
    - a. Sub Bagian Pariwisata dan Budaya
    - b. Sub Bagian BUMD
    - c. Sub Bagian Penanaman Modal
2. Biro Pembangunan, membawahkan :
- i. Bagian Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan Penyusunan Program Sekretariat Daerah
    - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
    - c. Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah I
    - b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah II
    - c. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBD
  - iii. Bagian Monitoring dan Evaluasi APBN
    - a. Sub Bagian Monev APBN Wilayah I
    - b. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBN
    - c. Sub Bagian Monev APBN Wilayah II
3. Biro Layanan Pengadaan, membawahkan :
- i. Bagian Data Informasi

- a. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi
- b. Sub Bagian Layanan Publik
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- ii. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
  - a. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
  - c. Sub Bagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan
- iii. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - a. Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik
  - b. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi
  - c. Sub Bagian Layanan dan Dukungan

III. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- 1. Biro Organisasi, membawahkan :
  - i. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Analisis Organisasi
    - b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
    - c. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan
  - ii. Bagian Pengembangan Kinerja, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
    - b. Sub Bagian Data Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
    - c. Sub Bagian Peningkatan Kinerja
  - iii. Bagian Tata Laksana, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan
    - b. Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik
    - c. Sub Bagian Tata Usaha

2. Biro Umum, membawahkan :
  - i. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Rumah Tangga
    - b. Sub Bagian Tata Usaha
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
  - ii. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b. Sub Bagian Pengandaan dan Pemeliharaan
    - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Penyimpanan
  - iii. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Urusan Gaji
    - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas
    - c. Sub Bagian Perbendaharaan
3. Biro Humas dan Protokol membawahkan :
  - i. Bagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
    - a. Sub Bagian Tata Usaha
    - b. Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum
    - c. Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra
  - ii. Bagian Humas, Dokumentasi, Publikasi Media, dan IT
    - a. Sub Bagian Dokumentasi dan Audio Visual
    - b. Sub Bagian Publikasi Media Cetak
    - c. Sub Bagian Publikasi Media Elektronik dan IT
  - iii. Bagian Protokol
    - a. Sub Bagian Undangan
    - b. Sub Bagian Acara
    - c. Sub Bagian Pelayanan Tamu

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Staf Ahli

Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah personil termasuk honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 527 orang, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.1

Klasifikasi ASN Berdasarkan Eselon pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ESELON I	1
2	ESELON II	15
3	ESELON III	26
4	ESELON IV	78
5	JFU/JFT/CPNS	210
6	HONORER	197
<b>Total</b>		<b>527</b>

*Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

Tabel I.2

Klasifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	S3	5
2	S2	34
3	S1	229
4	D4	4
5	D3	49
6	D1	3
7	SMA	180
8	SMP	16
9	SD	7
<b>Total</b>		<b>527</b>

*Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

BAB II  
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk Penetapan Kinerja 2018, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan review terhadap sasaran, indikator dan target kinerja tahun 2018, dikarenakan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kriteria spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevance*), dan memiliki batasan waktu (*time-bound*).

Adapun review terhadap Perjanjian kinerja 2018 tersebut tentunya diselaraskan atau disesuaikan dengan rencana strategis 2017-2022 yang

juga telah dilakukan review atau perubahan. Dalam rencana strategis ataupun dalam Perjanjian Kinerja 2018 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 20 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
3. Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampaikan pendapat/aspirasi
4. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan
5. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos
6. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata
7. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
8. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam
9. Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
10. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif

11. Meningkatnya nilai manajemen perubahan
12. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi
13. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda
14. Meningkatnya nilai akuntabilitas
15. Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik
16. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
17. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan
18. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan
19. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik
20. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani

**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RENJA )**

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pembangunan telah menyusun rencana kinerja (renja) tahun 2018 telah disampaikan kepada Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**C. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pada bulan Desember tahun 2018 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Prov. Kep. Babel tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel II.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TH. 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>BIRO PEMERINTAHAN</b>				
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	80%
2	Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan	Presentase pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

		kerjasama		
3	Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Presentase pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80%
4	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi	Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampikan pendapat/aspirasi	Presentase partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampikan pendapat/aspirasi	80%
<b>BIRO KESRA</b>				
1	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentase fasilitasi bidang keagamaan	75%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

	berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru	80%
		Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	70%
<b>BIRO HUKUM</b>				
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	80%
			Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	80%
			Persentase publikasi produk hukum	80%
<b>BIRO EKONOMI</b>				
1	Meningkatnya rekomendasi kebijakan	Meningkatnya rekomendasi	Persentase rekomendasi	80%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

	bidang perekonomian	kebijakan di bidang sumber daya alam	kebijakan terkait sumber daya alam	
		Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya	Persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	80%
		Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Administrasi Perekonomian yang di implementasikan	80%
<b>BIRO PEMBANGUNAN</b>				
1	Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan	80%
<b>BIRO LAYANAN PENGADAAN</b>				

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	90%
<b>BIRO ORGANISASI</b>				
1	Birokrasi yang bersih dan akurat	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	50%
			Persentase pola pikir dan budaya kerja	40%
			Persentase menurunnya resiko kegagalan	50%
		Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)	50%
		Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	55%
		Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai	56%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

			laporan kinerja	
		Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	50%
<b>BIRO UMUM</b>				
1	Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	62,51
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	62,51
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	62,51
<b>BIRO HUMAS DAN PROTOKOL</b>				
1	Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	80%

	dan berkualitas	Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	80%
--	-----------------	--	--	-----

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.1.

##### Pengukuran Kinerja

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi administrasi wilayah	persentase koordinasi administrasi kewilayahan yang dilaksanakan	80%	90%	113%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

2	Meningkatnya jumlah koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah	persentase koordinasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan	80%	95,22%	119%
3	Meningkatnya jumlah pelaksanaan kerjasama daerah yang dikembangkan.	persentase koordinasi kerjasama pemerintah daerah yang dilaksanakan	80%	83,67%	105%
4	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Keagamaan dan Persentase Fasilitasi Bidang Kagamaan	Persentase peningkatan Fasilitasi bidang keagamaan	75%	96,43	128%
5	Meningkatnya pelayanan di Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Presentase Perumusan Koordinasi Kebijakan	80%	100%	125%
6	Terwujudnya Penerima bantuan dana bantuan yang tepat sasaran pada	Persentase Hibah yang Terakomodir	70%	100%	143%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

	Masyarakat				
7	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan peraturan perundang-undangan	80%	89%	111%
8	Meningkatnya Pelayanan Hukum, Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum pemerintah daerah	80%	95,80%	120%
9	Meningkatnya Dokumentasi dan informasi hukum	dokumentasi dan informasi hukum	80%	96%	120%
10	Meningkatnya rekomendasi kebijakan serta mikro dan makro ekonomi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Subbag Analis Makro Ekonomi dan Sarana Perekonomian yang ditindaklanjuti, 2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Tata Usaha, dan 3. Persentase rekomendasi	80%	100%	125%

		kebijakan di Subbag Perindag, Koperasi dan UKM yang ditindaklanjuti			
11	Meningkatnya rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sumber Daya Alam secara konsisten	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Subbag Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti  2. Persentase rekomendasi kebijakan di Subbag Pertanian, Perkebunan, Kelautan , Perikanan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti  3. Persentase rekomendasi kebijakan di Subbag lingkungan Hidup	80%	100%	125%

		dan Kehutanan yang ditindaklanjuti			
12	Meningkatnya pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat melalui Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya.	1. Persentase rekomendasi Kebijakan di Subbag BUMD yang ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi kebijakan di Subbag Penanaman Modal Yang ditindaklanjuti 3. Persentase rekomendasi kebijakan di Subbag Pariwisata dan Budaya yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%
13	Meningkatnya Fasilitasi Pengendalian Kebijakan dan Koordinasi Bidang	Persentase Fasilitasi Kebijakan dan Koordinasi bidang pembangunan yang Termanfaatkan	80%	94%	118%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

	Pembangunan				
14	Terciptanya pengadaan barang/jasa. Yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement.	90%	100%	111%
15	Meningkatnya nilai Manajemen Perubahan	1. Persentase peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	50%	100%	200%
		2. Persentase perubahan pola pikir dan budaya kerja	40%	100%	250%
		3. Persentase menurunnya resiko kegagalan	50%	100%	200%
16	Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	50%	100%	200%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

17	Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	55%	88,89%	162%
18	Meningkatnya Nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	56%	100%	179%
19	Meningkatnya koordinasi, pengumpulan, penyaringan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik	Persentase hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengumpulan, penyaringan dan pelayanan informasi dan dokumentasi	80%	100%	125%
20	Meningkatnya pelayanan kehumasan dokumentasi, publikasi media Massa, Elektronik dan IT	Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan, melalui media massa, Elektronik dan IT	80%	100%	125%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

21	Meningkatnya kegiatan protokoler yang terfasilitasi	Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan, melalui media massa, Elektronik dan IT	80%	100%	125%
22	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan Daerah dan Aparatur PD atas Pelayanan Bidang Kerumahtanggaan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Bidang Kerumahtanggaan	62,51%	100%	160%
23	Meningkatnya Kepuasan atas Pelayanan Bidang Perlengkapan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Bidang Perlengkapan	62,51%	100%	160%
24	Meningkatnya Kepuasan atas Pelayanan Bidang Keuangan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Bidang Perlengkapan	62,51%	100%	160%

Hambatan dan Upaya dalam mencapai sasaran strategis adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama

*Hambatan:* Kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pembangunan. Sementara pemerintah daerah lemah dalam kebijakan. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat.

*Upaya* : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengatur keuangan daerah sehingga dapat mencukupi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyusunan APBD sehingga Keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

2. Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampaikan pendapat/aspirasi

*Hambatan:* Kurangnya Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses demokrasi.

*Upaya* : Meningkatkan Keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam berdemokrasi dan berpolitik

3. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan

*Hambatan:*Keterbatasan aparatur pemerintahan, sehingga tidak mampu secara optimal dalam memberikan pelayanan.

*Upaya* : melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi aparatur pemerintahan, sehingga memiliki kapabilitas dan profesionalitas tinggi dalam melayani masyarakat.

4. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos

*Hambatan:*Dalam proses pelayanan sering kali masyarakat tidak melakukan apa yang sudah diatur dalam aturan.

*Upaya* : memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus segera bisa mengubah paradigma para aparatur dari mau dilayani menjadi pelayan yang baik serta tertib dan tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku.

5. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata

*Hambatan:* Keterbatasan aparatur pemerintahan, sehingga tidak mampu secara optimal dalam memberikan pelayanan.

*Upaya* : Mengadakan Sistem rekrutmen aparatur pemerintahan,dengan Seleksi aparatur,sehingga mampu menghasilkan pegawai yang professional.

6. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum

*Hambatan:* kurangnya kesesuaian produk hukum daerah dengan kebutuhan masyarakat.

*Upaya* : dengan memeriksa kembali rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam

*Hambatan:* Kurangnya pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga janagn sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi.

*Upaya* : Pemerintah Pusat harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

8. Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan

*Hambatan:* Monev belum bisa menjadi media atau alat ukur untuk pengendalian pembangunan secara optimal

*Upaya* : Meningkatkan Kualitas SPIP di Provinsi.

9. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif

*Hambatan:* Masih adanya intervensi dari berbagai kelompok yang berkepentingan, baik eksternal maupun internal sehingga kurangnya minat pegawai untuk menjadi panitia pengadaan barang/jasa dan pegawai aparatur yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP.

*Upaya* : Melakukan upaya baik melalui kapasitas referensi, konsultasi maupun pembinaan teknis kepada OPD akan pentingnya melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP.

10. Meningkatnya nilai manajemen perubahan

*Hambatan:* Dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan terkadang kurang didukungnya dana, mengingat kondisi keuangan daerah yang lebih memprioritaskan program-program yang lebih penting.

*Upaya* : Akan diusulkan lagi program dan kegiatan yang dapat mencapai indikator kegiatan yang telah direncanakan.

11. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi

*Hambatan:* Masih kurangnya pemahaman OPD untuk mengimplementasikan serta melaksanakan kinerja organisasinya.

*Upaya* : Melakukan monitoring dan evaluasi

12. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda

*Hambatan:* Kurangnya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Upaya* : Mengadakan pembinaan bimtek terhadap pelaksanaan SOP secara terus menerus

13. Meningkatnya nilai akuntabilitas

*Hambatan:* Masih kurangnya pemahaman SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membenahi dokumen SAKIP, dan pentingnya pemanfaatan dokumen tersebut bagi peningkatan kinerja SKPD.

*Upaya* : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu melakukan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman terhadap implementasi SAKIP baik di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka maupun di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Bimtek SAKIP.

14. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan

*Hambatan:* belum optimalnya Layanan Umum dan Rumah Tangga sesuai SOP

*Upaya* : Meningkatkan kikerja ASN

15. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan

*Hambatan:* data barang milik daerah pada Sekretariat daerah sering berpindah/berubah ubah tanpa adanya pemberitahuan maupun pencatatan yang jelas serta belum sepenuhnya mendapat dukungan dana, mengingat kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas

*Upaya* : memperbaharui pencatatan dan pengawasan terhadap asset dan mutasi barang yang dilakukan secara berkala serta mengupayakan dukungan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor bagi pegawai Sekretariat Daerah

16. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan

*Hambatan:* Kurangnya Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Setda

*Upaya* : Meningkatkan kikerja ASN

17. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik

*Hambatan:* Keterbatasan Informasi dan Dokumentasi yang bisa diakses Publik (PD Pembantu)

*Upaya* : Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana

18. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani

*Hambatan:* Kurangnya anggaran kegiatan dalam melayani tamu pemerintah dan negara

*Upaya* : Menambahkan anggaran agar kegiatan berjalan dengan baik.

**B. Realisasi Anggaran**

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dapat diuraikan realisasi Anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	625.821.975	279.036.511	45
2	Program Pengembangan Otonomi Daerah	1.448.352.830	1.413.000.098	98
3	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	1.553.819.000	1.470.581.335	95
4	Peningkatan Pembinaan Keagamaan	8.250.095.000	7.419.138.819	90
5	Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan,KB,dan Pemuda	1.065.854.500	968.798.600	91
6	Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial,Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	330.667.600	317.196.650	96
7	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang -undangan	1.809.529.600	1.701.855.395	94
8	Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	936.663.626	724.240.327	77
9	Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	624.734.500	589.130.396	94
10	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	451.210.114	385.996.240	86
11	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	172.674.878	165.307.296	96
12	Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	811.270.362	481.432.826	59

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

13	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	328.318.000	303.465.842	92
14	Program Perencanaan Sekretariat Daerah	187.943.030	160.507.629	85
15	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	629.758.213	605.650.881	96
16	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	196.013.400	134.727.490	69
17	Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	384.319.700	323.373.394	84
18	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.904.231.500	1.778.588.600	93
19	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.956.880.500	1.814.816.030	93
20	Peningkatan dan pengembangan kelembagaan serta analisis jabatan	508.614.445	388.835.183	76
21	Peningkatan dan pengembangan kinerja pemerintah daerah	450.700.872	375.650.482	83
22	Peningkatan dan pengembangan tata laksana pemerintah daerah	581.260.565	499.637.113	86
23	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	49.066.506.300	44.859.145.463	91
24	Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	2.040.607.314	1.889.559.389	93
25	Peningkatan Pelayanan Protokoler	65.612.500	48.870.000	74
26	Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	1.077.022.885	1.059.488.769	98

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2019.

Dari sasaran strategis yang hendak dicapai, rata-rata semuanya mencapai kinerja "berhasil" Sedangkan untuk sasaran strategis yang belum mencapai target 100% tetap akan ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERZALDI ROSMAN  
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Juli 2018

Pihak kedua, GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,	Pihak pertama, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
--	--

ERZALDI ROSMAN

Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si  
Pembina Utama  
NIP 19640130 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan di bidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	80%
2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien di bidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80 %
3	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keagamaan	Persentase fasilitas di bidang keagamaan	75%
4	Meningkatnya pelayanan publik ke padang erimah ibah dan bansos	Persentase masyarakat perimah ibah dan bansos yang terbaru	80%
5	Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemudatan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemudatan pariwisata	70%
6	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum sertadokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	80%
		Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	80%
		Persentase publikasi produk hukum	80%
4	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumberdaya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumberdaya alam	80%
5	Meningkatnya fasilitas pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitas kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan	80%
6	Terciptanya pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	90%
7	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	50%

**LAPORAN KINERJA**  
**SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018**

		Persentase polapikirdanbudayakerja	40%
		Persentase menurunyaresikokegalan	50%
8	Meningkatnyapenataanorganisasi	Persentaseperangkatdaerah yang efektifdanefisien)	50%
9	Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	55%
		Presentase Disiplin Pegawai	50%
10	Meningkatnyanilaiakuntabilitas	Persentasepeningkatannilailaporankinerja	56%
11	Meningkatnyakuaitaspelayanan publik	Index pelayanan publik	50%
12	Meningkatnyakepuasanataspelayananbidangkerumahtangga	Tingkat kepuasanataspelayananbidangkerumahtangga	62,51
13	Meningkatnyakepuasanataspelayananbidangperlengkapan	Tingkat kepuasanataspelayananbidangperlengkapan	62,51
14	Meningkatnyakepuasanataspelayananbidangkeuangan	Tingkat kepuasanataspelayananbidangkeuangan	62,51
15	Meningkatnyainformasikehumasan yang diterimaoleh public	Persentaseinformasikehumasan yang diterimaolehpublik	80%
16	Meningkatnya agenda pimpinanadaerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinanadaerah yang terlayani	80%

Program	Anggaran
Pengembangan Otonomi Daerah	Rp. 1.448.352.830,00
Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Rp. 8.196.096.400,00
Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.892.029.600,00
Peningkatan Pelayanan Hukum	Rp. 955.806.626,00
Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Rp. 750.391.500,00
Peningkatan Koordinasi kebijakan perekonomian	Rp. 451.210.114,00

